Scripta Humanika:
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Vol. 1 No. 4 May 2026, Hal 361-372
ISSN: 3110-892X (Print) ISSN: 3110-8911 (Electronic)
Open Access: https://scriptaintelektual.com/scripta-humanika/index

Citra Tokoh Kepemimpinan Politik Ratu Tatu Chasanah dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensial

Muhammad Daffa Pratama[1*], Muhammad Adjie Akbar[2], Ika Arinia Indriyany[3]
[1-3] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
email: 6670230133@untirta.ac.id[1], 6670230138@untirta.ac.id[2], ika.arinia@untirta.ac.id[3]

Article Info :
Received:
28-04-2026
Revised:
17-05-2026
Accepted:
23-05-2026

Abstract

This study examines the political leadership image of Ratu Tatu Chasanah through the perspective of Simone de Beauvoir's existentialist feminism within the context of local politics in Indonesia. The research employed an empirical qualitative approach using a descriptive case study design focused on the political dynamics of Serang Regency. Data were collected through semi structured interviews, documentation studies, media reports, government archives, and academic literature related to women's leadership and feminist political discourse. The findings demonstrate that Ratu Tatu Chasanah's leadership represents a form of women's existential affirmation within a patriarchal political structure through active participation in governance, strategic decision making, and the construction of public legitimacy. Her leadership also contributed to the transformation of social perceptions regarding women's political capacities and weakened gender based stereotypes in local governance. From the perspective of existentialist feminism, political leadership becomes a medium through which women negotiate subjectivity, autonomy, and social recognition within contemporary democratic institutions.

Keywords: *Existentialist Feminism, Local Politics, Political Leadership, Ratu Tatu Chasanah, Women's Representation.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji citra kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah melalui perspektif feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir dalam konteks politik lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan desain studi kasus deskriptif yang berfokus pada dinamika politik Kabupaten Serang. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, laporan media, arsip pemerintah, serta literatur akademis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dan wacana politik feminis. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah mewakili bentuk afirmasi eksistensial perempuan dalam struktur politik patriarkal melalui partisipasi aktif dalam tata kelola, pengambilan keputusan strategis, dan pembentukan legitimasi publik. Kepemimpinannya juga berkontribusi pada transformasi persepsi sosial mengenai kapasitas politik perempuan serta melemahkan stereotip berbasis gender dalam tata kelola lokal. Dari perspektif feminisme eksistensial, kepemimpinan politik menjadi medium di mana perempuan menegosiasikan subjektivitas, otonomi, dan pengakuan sosial dalam institusi demokratis kontemporer.

Keywords: Feminisme Eksistensial, Politik Lokal, Kepemimpinan Politik, Ratu Tatu Chasanah, Representasi Perempuan.

©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik kontemporer mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir seiring menguatnya agenda demokrasi inklusif, representasi gender, dan pengarusutamaan kesetaraan dalam tata kelola pemerintahan global, namun perkembangan tersebut pada saat yang sama memperlihatkan paradoks struktural karena keterlibatan perempuan dalam ruang kekuasaan formal masih terus dibatasi oleh konfigurasi budaya patriarki, oligarki politik, serta konstruksi maskulinitas institusional yang mengakar dalam sistem sosial modern. Literatur feminisme politik mutakhir menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam politik tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan kuantitas keterwakilan, melainkan berkaitan erat dengan persoalan eksistensi, legitimasi simbolik, dan kemampuan perempuan menegosiasikan identitasnya di tengah arena politik yang historis dibangun berdasarkan logika dominasi laki-laki (Tong & Botts, 2018). Dalam konteks demokrasi negara berkembang, termasuk Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks

karena proses demokratisasi lokal justru berjalan beriringan dengan menguatnya patronase politik, klientelisme elektoral, serta konsolidasi kekuasaan elite daerah yang secara tidak langsung memengaruhi pola keterlibatan perempuan dalam politik lokal (Aspinall & Sukmajati, 2016). Situasi ini diperburuk oleh kemunduran kualitas demokrasi yang ditandai dengan pelemahan institusi demokrasi, menguatnya populisme lokal, dan reproduksi dinasti politik yang sering kali menjadikan perempuan hadir dalam ruang politik melalui jalur relasi kekuasaan keluarga, bukan melalui pengakuan independen atas kapasitas politiknya (Aspinall & Mietzner, 2019). Dalam lanskap demikian, kemunculan pemimpin perempuan di tingkat daerah menghadirkan problem akademik yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar isu representasi gender, sebab keberadaan mereka sekaligus merefleksikan negosiasi antara eksistensi perempuan, legitimasi politik, struktur patriarki, dan dinamika demokrasi lokal kontemporer. Fenomena meningkatnya kepemimpinan perempuan dalam politik lokal Indonesia bahkan mulai dipandang sebagai gejala transformasi sosial baru yang menunjukkan pergeseran persepsi masyarakat terhadap kapasitas perempuan dalam kepemimpinan publik, meskipun transformasi tersebut belum sepenuhnya menghapus stereotip gender yang mengakar dalam budaya politik nasional (Kompas, 2021; Suryakusuma, 2011).

Kajian-kajian terdahulu mengenai perempuan dan kekuasaan pada dasarnya telah memperlihatkan perkembangan teoritik yang cukup luas, terutama melalui pendekatan feminisme eksistensial yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus membebaskan diri dari posisi "liyan" dalam struktur sosial patriarkal. Pemikiran Simone de Beauvoir dalam tradisi feminisme eksistensial telah digunakan secara intensif untuk membaca pengalaman subordinasi perempuan, proses pencarian identitas diri, hingga bentuk-bentuk resistensi perempuan terhadap dominasi maskulin dalam berbagai konteks sosial dan budaya (Tong & Botts, 2018). Dalam perkembangan mutakhir, pendekatan tersebut banyak diterapkan dalam kajian sastra dan media budaya Indonesia, seperti penelitian Ridwan dan Vanesa yang menunjukkan bagaimana perempuan mengalami objektifikasi dalam struktur budaya patriarki sekaligus melakukan perlawanan eksistensial terhadap subordinasi sosial (Ridwan & Vanesa, 2025), penelitian Sinaga mengenai pencarian identitas perempuan dalam sastra Indonesia modern melalui lensa feminisme eksistensial (Sinaga, 2025), maupun penelitian Rusydah, Heryani, dan Solihin yang mengkaji citra perempuan sebagai konstruksi simbolik dalam representasi film (Rusydah et al., 2025). Kajian lain bahkan memperluas analisis feminisme ke arah pembacaan relasi kuasa dan dominasi tubuh perempuan dalam media visual serta budaya populer melalui perspektif feminisme radikal (Ridwan et al., 2026). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan kontribusi penting dalam memahami bagaimana perempuan membangun eksistensinya di tengah struktur patriarki, sebagian besar studi masih bergerak pada ruang representasi simbolik dan narasi budaya sehingga persoalan perempuan dalam arena kekuasaan politik praktis belum dianalisis secara mendalam sebagai arena eksistensial yang konkret. Pada saat yang sama, studi politik Indonesia lebih banyak menempatkan perempuan sebagai bagian dari pembahasan demokrasi elektoral, klientelisme, dan dinasti politik tanpa secara serius mengaitkan kepemimpinan perempuan dengan persoalan subjektivitas, eksistensi, dan konstruksi identitas perempuan dalam struktur kekuasaan lokal (Aspinall & Sukmajati, 2016; Aspinall & Mietzner, 2019).

Kecenderungan tersebut menunjukkan adanya keterputusan konseptual antara studi feminisme eksistensial dengan kajian kepemimpinan politik perempuan di Indonesia, sebab sebagian besar penelitian masih memisahkan perempuan sebagai objek budaya dari perempuan sebagai aktor politik yang aktif membangun legitimasi kekuasaan dalam ruang publik. Literatur mengenai kepemimpinan perempuan lokal umumnya lebih berfokus pada efektivitas birokrasi, strategi elektoral, atau dinamika dinasti politik tanpa membedah bagaimana citra kepemimpinan perempuan dibentuk melalui proses negosiasi identitas di tengah budaya patriarki yang tetap bekerja secara laten dalam struktur politik daerah. Padahal, dalam konteks politik Indonesia, keberhasilan perempuan menduduki jabatan publik tidak selalu identik dengan terbentuknya relasi kekuasaan yang setara karena perempuan sering kali tetap diposisikan sebagai perpanjangan simbolik dari kekuasaan laki-laki atau elite keluarga politik tertentu (BBC News Indonesia, 2020). Situasi tersebut memperlihatkan ambivalensi demokrasi lokal Indonesia, yakni ketika ruang partisipasi perempuan tampak semakin terbuka secara formal, tetapi struktur legitimasi sosial terhadap kepemimpinan perempuan masih dibangun melalui logika patriarki yang mempersyaratkan afiliasi kekuasaan maskulin sebagai sumber validasi politik. Kritik terhadap fenomena ini sebenarnya telah lama diajukan dalam konsep ibuisme negara yang menjelaskan bagaimana perempuan dalam politik sering direpresentasikan bukan sebagai subjek otonom, melainkan

sebagai figur domestik yang dilegitimasi melalui konstruksi moral dan relasi keluarga (Suryakusuma, 2011). Akan tetapi, literatur yang ada belum secara mendalam menjelaskan bagaimana perempuan pemimpin daerah membangun eksistensinya sebagai subjek politik yang independen di tengah kontradiksi antara representasi demokratis, patronase politik, dan stereotip gender yang masih mengakar kuat dalam budaya politik lokal Indonesia.

Kekosongan akademik tersebut menjadikan penelitian mengenai citra kepemimpinan politik perempuan dalam perspektif feminisme eksistensial memiliki urgensi ilmiah yang tinggi, terutama karena demokrasi lokal Indonesia sedang menghadapi problem serius berupa pelemahan institusi demokrasi, oligarkisasi politik daerah, dan meningkatnya politik berbasis jejaring keluarga yang secara langsung memengaruhi kualitas representasi perempuan dalam ruang publik (Aspinall & Mietzner, 2019). Dalam konteks tersebut, analisis terhadap kepemimpinan perempuan tidak dapat lagi berhenti pada pembacaan administratif mengenai keberhasilan program pembangunan atau capaian elektoral, melainkan harus diarahkan pada persoalan bagaimana perempuan mengonstruksi legitimasi dirinya sebagai subjek politik di tengah sistem sosial yang masih memproduksi bias gender secara struktural. Kepemimpinan perempuan daerah menjadi penting dikaji karena keberadaannya berpotensi menghadirkan model representasi politik alternatif yang mampu menantang konstruksi maskulin dalam praktik kekuasaan lokal. Persoalan ini semakin relevan ketika peningkatan jumlah pemimpin perempuan di Indonesia tidak selalu diikuti oleh perubahan paradigma sosial terhadap kapasitas perempuan dalam memimpin, sehingga keberhasilan politik perempuan sering tetap dibaca melalui relasi kekerabatan, simbol moralitas domestik, atau stereotip emosional yang melekat pada gender perempuan (Kompas, 2021; BBC News Indonesia, 2020). Dalam perspektif pendidikan politik dan demokrasi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar bagaimana perempuan memperoleh akses terhadap jabatan publik, tetapi bagaimana masyarakat membangun kesadaran kritis terhadap eksistensi perempuan sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas intelektual, otonomi, dan otoritas yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian mengenai citra tokoh kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah ditempatkan dalam posisi akademik yang berupaya menjembatani kajian feminisme eksistensial dengan studi politik lokal Indonesia melalui pembacaan terhadap kepemimpinan perempuan sebagai arena produksi eksistensi sosial dan politik perempuan. Ratu Tatu Chasanah sebagai figur kepala daerah perempuan di Kabupaten Serang menghadirkan kasus yang menarik karena kepemimpinannya berada pada persimpangan antara representasi perempuan, dinamika dinasti politik lokal, dan transformasi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Kajian ini tidak memposisikan kepemimpinan perempuan semata sebagai fenomena administratif pemerintahan daerah, tetapi sebagai proses eksistensial ketika perempuan berusaha keluar dari posisi "liyan" dan membangun dirinya sebagai subjek yang memiliki legitimasi politik dalam struktur sosial patriarkal sebagaimana dijelaskan dalam tradisi feminisme eksistensial Simone de Beauvoir (Tong & Botts, 2018). Pada titik ini, penelitian juga berupaya memperluas penggunaan teori feminisme eksistensial yang selama ini lebih dominan digunakan dalam kajian sastra, film, dan budaya populer menuju analisis politik lokal yang bersifat empiris dan kontekstual (Ridwan & Vanesa, 2025; Sinaga, 2025; Rusydah et al., 2025). Pembacaan terhadap citra kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah menjadi penting karena memungkinkan eksplorasi mengenai bagaimana perempuan membangun otoritas politik, menegosiasikan identitas gender, sekaligus menghadapi reproduksi stigma patriarkal dalam ruang kekuasaan daerah yang masih sangat dipengaruhi jejaring elite politik lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis citra kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah dalam perspektif feminisme eksistensial Simone de Beauvoir dengan menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai proses pembentukan eksistensi, subjektivitas, dan legitimasi politik dalam struktur sosial patriarkal. Kajian ini berupaya menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam politik lokal tidak dapat dipahami hanya melalui dimensi elektoral dan administratif, melainkan harus dibaca sebagai arena negosiasi identitas sosial, relasi kuasa, dan perjuangan eksistensial perempuan dalam memperoleh pengakuan sebagai subjek politik yang otonom. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa perluasan penerapan feminisme eksistensial dalam studi politik lokal Indonesia sekaligus memperkaya diskursus mengenai perempuan dan demokrasi dalam konteks masyarakat patriarkal kontemporer. Dari sisi metodologis, penelitian ini menawarkan pembacaan interdisipliner yang menghubungkan kajian feminisme, politik lokal, dan konstruksi citra

kepemimpinan perempuan melalui pendekatan kualitatif kritis yang menempatkan pengalaman sosial perempuan sebagai pusat analisis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis citra kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah dalam perspektif feminisme eksistensial Simone de Beauvoir. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian tidak hanya bertumpu pada kajian konseptual, tetapi juga memanfaatkan data faktual mengenai praktik kepemimpinan politik perempuan dalam konteks pemerintahan daerah Kabupaten Serang. Desain penelitian diarahkan pada studi kasus politik lokal untuk memahami secara mendalam bagaimana kepemimpinan perempuan dikonstruksi, direpresentasikan, dan dinegosiasikan dalam ruang sosial patriarkal. Partisipan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi informan terhadap fokus kajian, yang meliputi akademisi, pengamat politik lokal, aparatur pemerintahan daerah, serta tokoh masyarakat yang memahami dinamika kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, studi dokumentasi, dan studi literatur terhadap dokumen kebijakan daerah, pemberitaan media, pidato politik, arsip pemerintahan, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, politik lokal, dan feminisme eksistensial. Penggunaan berbagai sumber data tersebut dimaksudkan untuk membangun pembacaan yang komprehensif mengenai posisi perempuan dalam struktur kekuasaan lokal sekaligus memahami bagaimana kepemimpinan politik perempuan direpresentasikan dalam diskursus publik dan praktik pemerintahan daerah (UN Women, 2020; Detik News, 2022).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berfungsi melakukan interpretasi kritis terhadap data empiris melalui kerangka feminisme eksistensial Simone de Beauvoir, terutama berkaitan dengan konsep eksistensi perempuan, subjektivitas, transendensi, dan penolakan terhadap posisi perempuan sebagai "liyan" dalam struktur sosial patriarkal. Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta pemeriksaan konsistensi interpretasi melalui perbandingan antara data wawancara, dokumen resmi, dan representasi media mengenai kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana feminis guna mengidentifikasi konstruksi citra kepemimpinan perempuan dalam konteks politik lokal. Proses analisis diarahkan untuk membaca hubungan antara representasi kepemimpinan perempuan, dinamika kekuasaan lokal, dan struktur patriarki yang memengaruhi legitimasi politik perempuan dalam ruang publik. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek etika penelitian melalui penerapan prinsip informed consent, kerahasiaan identitas informan, objektivitas interpretasi data, serta penghindaran bias gender dalam proses analisis agar hasil penelitian tetap menjaga integritas akademik dan sensitivitas sosial terhadap isu kepemimpinan perempuan dalam politik lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Eksistensi Perempuan dalam Kepemimpinan Politik Lokal

Kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang menunjukkan perubahan penting dalam representasi perempuan pada struktur politik lokal yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hasil wawancara dengan akademisi dan pengamat politik lokal memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan menduduki jabatan kepala daerah masih dipandang sebagai fenomena yang tidak lazim dalam kultur politik daerah bercorak patriarkal. Informan penelitian menilai bahwa keberadaan perempuan dalam posisi strategis pemerintahan sering kali tetap dihadapkan pada keraguan publik mengenai kapasitas kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa berbasis gender masih mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi kepemimpinan perempuan dalam ruang publik politik (Suryakusuma, 2011).

Data empiris menunjukkan bahwa citra kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah dibangun melalui kombinasi antara legitimasi politik, kapasitas administratif, dan representasi simbolik perempuan dalam pemerintahan daerah. Wawancara dengan aparatur pemerintahan daerah memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan dinilai memiliki pendekatan komunikasi yang lebih dialogis dalam koordinasi birokrasi. Pendekatan tersebut dipersepsikan mampu menciptakan hubungan kerja yang lebih adaptif dalam penyelesaian persoalan pelayanan publik di Kabupaten Serang. Temuan ini

menunjukkan bahwa citra kepemimpinan perempuan tidak hanya dibentuk oleh identitas gender, tetapi juga oleh kemampuan manajerial dan efektivitas birokrasi dalam praktik pemerintahan daerah (UN Women, 2020).

Perspektif feminisme eksistensial memandang keterlibatan perempuan dalam politik sebagai bentuk transendensi terhadap struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai "liyan" dalam relasi kekuasaan sosial. Dalam konteks kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah, posisi kepala daerah menunjukkan bahwa perempuan mampu memasuki arena politik yang secara historis dikonstruksi sebagai ruang maskulin. Wawancara dengan tokoh masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat mulai memandang kepemimpinan perempuan sebagai sesuatu yang normal dalam dinamika politik lokal. Perubahan persepsi tersebut menunjukkan adanya pergeseran konstruksi sosial mengenai kapasitas perempuan dalam kepemimpinan publik (Tong & Botts, 2018).

Hasil dokumentasi pidato politik dan pemberitaan media memperlihatkan bahwa citra kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah banyak dikaitkan dengan kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan kesinambungan pembangunan lokal. Media lokal cenderung merepresentasikan kepemimpinan perempuan melalui narasi ketegasan administratif dan kedekatan sosial dengan masyarakat. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan dalam politik tidak lagi semata diposisikan sebagai simbol pelengkap demokrasi, tetapi mulai dipandang sebagai aktor politik substantif. Fenomena ini sejalan dengan pandangan feminisme eksistensial yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembentukan realitas sosial dan politik (Sinaga, 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi politik perempuan di tingkat daerah tetap dipengaruhi oleh struktur kekuasaan lokal dan konfigurasi elite politik. Beberapa informan menyatakan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik sering kali masih diasosiasikan dengan jejaring politik keluarga atau dukungan elite partai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ruang politik lokal belum sepenuhnya terlepas dari praktik patronase dan oligarki politik daerah. Dinamika ini relevan dengan kajian mengenai politik lokal Indonesia yang menempatkan relasi kekuasaan elite sebagai faktor penting dalam pembentukan legitimasi politik daerah (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Tabel 1. Persepsi Informan terhadap Citra Kepemimpinan Politik Ratu Tatu Chasanah

Kategori Informan	Persepsi Dominan	Bentuk Representasi Kepemimpinan
Akademisi	Adaptif dan simbolik	Representasi perempuan dalam politik lokal
Aparatur daerah	Administratif dan komunikatif	Stabilitas birokrasi pemerintahan
Tokoh masyarakat	Dekat dengan masyarakat	Kepemimpinan berbasis pendekatan sosial
Pengamat politik	Strategis dan pragmatis	Legitimasi politik daerah

Sumber: Data hasil wawancara dan reduksi tematik penelitian, 2026.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa citra kepemimpinan politik perempuan dibentuk melalui kombinasi antara kapasitas administratif dan representasi simbolik gender dalam ruang publik. Persepsi akademisi cenderung menempatkan kepemimpinan perempuan sebagai bentuk perubahan representasi politik lokal yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, aparatur pemerintahan lebih menekankan aspek efektivitas birokrasi dan pola koordinasi organisasi pemerintahan daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi perempuan dalam politik dibangun tidak hanya melalui identitas gender, tetapi juga melalui performa pemerintahan yang dinilai efektif oleh aktor sosial dan birokrasi.

Dalam perspektif Simone de Beauvoir, eksistensi perempuan ditentukan oleh kemampuannya melampaui batas sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Kepemimpinan politik perempuan di Kabupaten Serang memperlihatkan bahwa perempuan mampu melakukan proses transendensi melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan politik daerah. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan sebagai kepala daerah mulai membuka ruang partisipasi sosial yang lebih luas bagi perempuan dalam aktivitas politik lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan

bahwa representasi perempuan dalam politik memiliki implikasi simbolik terhadap perubahan struktur sosial patriarkal (Pratiwi & Putriani, 2024).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa citra kepemimpinan perempuan juga dipengaruhi oleh konstruksi media mengenai karakter kepemimpinan perempuan. Analisis pemberitaan media menunjukkan bahwa figur perempuan dalam politik sering direpresentasikan melalui pendekatan personal, emosional, dan relasional dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Meskipun demikian, representasi tersebut perlahan mengalami perubahan seiring meningkatnya legitimasi perempuan dalam jabatan publik strategis. Perubahan pola representasi ini memperlihatkan adanya transformasi diskursus publik mengenai posisi perempuan dalam struktur kekuasaan lokal (Rusydah et al., 2025).

Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah dalam konteks politik lokal memperlihatkan bahwa perempuan mampu membangun eksistensi politik melalui kapasitas birokrasi, legitimasi sosial, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan keterwakilan gender secara formal, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perempuan mengonstruksi otoritas politik dalam ruang publik. Perspektif feminisme eksistensial menempatkan fenomena tersebut sebagai bentuk penolakan perempuan terhadap posisi "liyan" dalam struktur patriarkal. Kepemimpinan perempuan pada akhirnya memperlihatkan bahwa ruang politik lokal mulai mengalami perubahan menuju relasi sosial yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam struktur kekuasaan publik (Ratu, Nai, & Jama, 2025).

Transendensi Perempuan dan Negosiasi Kekuasaan dalam Kepemimpinan Politik Lokal

Kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah memperlihatkan dinamika transendensi perempuan dalam struktur politik lokal yang masih dipengaruhi budaya patriarki. Temuan wawancara menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan di Kabupaten Serang tidak hanya dibentuk melalui posisi formal dalam pemerintahan, tetapi juga melalui kemampuan membangun relasi politik dengan elite daerah serta aktor birokrasi. Informan dari kalangan akademisi politik lokal menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan sering menghadapi pengujian legitimasi yang lebih ketat dibandingkan pemimpin laki-laki karena masih adanya asumsi sosial mengenai superioritas maskulinitas dalam politik daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam politik tidak hanya berhadapan dengan kompetisi kekuasaan, tetapi juga dengan konstruksi gender yang membatasi otoritas perempuan dalam ruang publik (Tong & Botts, 2018).

Dalam perspektif feminisme eksistensial Simone de Beauvoir, posisi perempuan dalam struktur kekuasaan sering ditempatkan sebagai "liyan" yang keberadaannya diukur berdasarkan relasinya dengan laki-laki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ratu Tatu Chasanah berupaya keluar dari posisi subordinat tersebut melalui penguatan kapasitas administratif, konsolidasi birokrasi, serta pengambilan keputusan strategis dalam pemerintahan daerah. Informan dari aparatur pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepemimpinan yang dijalankan menunjukkan pola koordinasi yang tegas dalam pengendalian program pembangunan daerah. Praktik tersebut mencerminkan proses transendensi perempuan sebagai subjek politik yang tidak lagi sekadar menjadi representasi simbolik dalam struktur kekuasaan lokal (Pratiwi & Putriani, 2024).

Dinamika negosiasi kekuasaan perempuan dalam politik lokal juga terlihat dari kemampuan pemimpin perempuan menghadapi dominasi elite politik laki-laki dalam proses pengambilan keputusan daerah. Beberapa informan menjelaskan bahwa struktur politik lokal Kabupaten Serang masih menunjukkan pola relasi patronase yang kuat sehingga pemimpin perempuan dituntut memiliki kemampuan komunikasi politik yang adaptif. Dalam konteks tersebut, kepemimpinan perempuan tidak hanya bergantung pada legitimasi elektoral, tetapi juga pada kemampuan membangun stabilitas relasi dengan partai politik, birokrasi, dan kelompok masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perempuan dalam politik lokal harus melakukan negosiasi berlapis untuk mempertahankan posisi kekuasaan dalam struktur patriarki politik daerah (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan perempuan di Kabupaten Serang tidak dibangun melalui pendekatan konfrontatif terhadap struktur patriarki, melainkan melalui pendekatan adaptif dan konsolidatif. Informan dari tokoh masyarakat menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan lebih diterima ketika mampu menunjukkan efektivitas birokrasi dan stabilitas pemerintahan dibandingkan menonjolkan identitas gender semata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi perempuan dalam politik lokal masih sangat dipengaruhi oleh standar performativitas kepemimpinan yang cenderung maskulin. Dalam perspektif feminisme eksistensial,

situasi tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan harus terus membuktikan eksistensinya agar diakui sebagai subjek politik yang otonom (Ridwan & Vanesa, 2025).

Tabel 2. Bentuk Negosiasi Politik dan Strategi Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah

Bentuk Tantangan Patriarki	Strategi Negosiasi Politik	Bentuk Transendensi Perempuan	Dampak terhadap Legitimasi Politik
Dominasi elite politik laki-laki	Konsolidasi birokrasi dan partai politik	Perempuan tampil sebagai pengambil keputusan	Penguatan otoritas politik daerah
Stereotip perempuan tidak tegas	Penguatan koordinasi pemerintahan	Penegasan kapasitas administratif perempuan	Peningkatan kepercayaan birokrasi
Resistensi sosial terhadap pemimpin perempuan	Pendekatan komunikatif kepada masyarakat	Perempuan menjadi subjek politik aktif	Penerimaan sosial lebih luas
Kultur politik patronase	Negosiasi relasi kekuasaan lokal	Adaptasi perempuan dalam arena politik	Stabilitas politik pemerintahan daerah

Sumber: Hasil analisis wawancara dan dokumentasi penelitian yang diolah peneliti (2026) dengan dukungan konseptual Tong & Botts (2018), Aspinall & Sukmajati (2016), serta Ridwan & Vanesa (2025).

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa transendensi perempuan dalam kepemimpinan politik berlangsung melalui kemampuan perempuan mengelola tantangan struktural yang bersumber dari budaya patriarki lokal. Perempuan tidak hanya dituntut hadir dalam ruang kekuasaan, tetapi juga harus mampu membangun legitimasi melalui efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik lokal berkaitan erat dengan kemampuan mengubah persepsi sosial mengenai otoritas perempuan dalam kepemimpinan publik. Kondisi tersebut sejalan dengan pemikiran Beauvoir yang menempatkan eksistensi perempuan sebagai hasil perjuangan aktif dalam melampaui batasan sosial patriarkal (Ramadhani, 2025).

Selain berkaitan dengan negosiasi kekuasaan, transendensi perempuan juga terlihat melalui kapasitas intelektual dalam proses pengambilan keputusan politik daerah. Informan penelitian menjelaskan bahwa kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah menunjukkan kemampuan membaca dinamika sosial masyarakat serta merumuskan prioritas pembangunan daerah secara administratif. Kapasitas tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai objek politik, melainkan sebagai aktor yang memiliki kemampuan menentukan arah kebijakan publik. Perspektif feminisme eksistensial memandang aktivitas intelektual sebagai bentuk pembebasan perempuan dari posisi subordinat dalam struktur sosial patriarki (Laritmas, 2025).

Relasi antara gender dan otoritas politik dalam pemerintahan daerah juga menunjukkan adanya resistensi sosial yang masih berkembang dalam masyarakat. Beberapa informan menyatakan bahwa perempuan pemimpin sering menghadapi penilaian berbasis gender yang tidak dialami pemimpin laki-laki, terutama berkaitan dengan ketegasan, rasionalitas, dan kemampuan memimpin birokrasi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tubuh perempuan dalam politik masih dibaca melalui konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai standar kepemimpinan ideal. Situasi ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan dalam politik tidak berhenti pada akses kekuasaan, tetapi juga mencakup perjuangan simbolik untuk memperoleh pengakuan sosial yang setara (Ni'mah et al., 2025).

Dalam konteks politik lokal Indonesia, keberadaan pemimpin perempuan juga berkaitan dengan perubahan relasi gender dalam masyarakat. Kehadiran perempuan dalam jabatan strategis pemerintahan daerah membuka ruang representasi baru mengenai posisi perempuan dalam struktur sosial lokal. Informan penelitian menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan mulai memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kemampuan perempuan dalam ruang publik, terutama di kalangan generasi muda dan aparatur birokrasi daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki dimensi transformasi sosial yang melampaui fungsi administratif pemerintahan (Kompas, 2021).

Perspektif feminisme eksistensial memandang bahwa perempuan yang berhasil menegaskan eksistensinya dalam ruang publik memiliki potensi menjadi agen perubahan sosial. Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah memperlihatkan bahwa perempuan dapat mempertahankan legitimasi politik bukan hanya melalui identitas simbolik perempuan, tetapi melalui kapasitas strategis dalam mengelola pemerintahan dan relasi kekuasaan daerah. Kondisi tersebut sekaligus menantang konstruksi sosial yang selama ini memandang politik sebagai arena maskulin yang identik dengan dominasi laki-laki. Fenomena ini memperlihatkan bahwa transendensi perempuan dalam politik lokal berlangsung melalui proses negosiasi kekuasaan yang kompleks dan berlapis (Hayati, 2024).

Kepemimpinan perempuan dalam politik lokal akhirnya menunjukkan bahwa eksistensi perempuan tidak lagi dapat dipahami sebatas representasi formal dalam struktur kekuasaan. Perempuan telah bergerak menjadi subjek politik yang aktif dalam membentuk arah kebijakan, membangun legitimasi publik, serta memengaruhi perubahan relasi gender dalam masyarakat lokal. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses transendensi perempuan berlangsung melalui kombinasi antara kapasitas intelektual, strategi negosiasi politik, dan kemampuan mempertahankan otoritas dalam kultur patriarki daerah. Perspektif Simone de Beauvoir menempatkan proses tersebut sebagai bentuk pembebasan perempuan dari posisi "liyan" menuju subjek politik yang memiliki otonomi dalam menentukan eksistensinya sendiri (Tong & Botts, 2018; Ridwan & Vanesa, 2025).

Transformasi Citra Kepemimpinan Perempuan dan Perubahan Relasi Gender Politik Lokal

Kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah dalam pemerintahan Kabupaten Serang memperlihatkan terjadinya perubahan persepsi masyarakat terhadap posisi perempuan dalam ruang politik lokal. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan memandang kepemimpinan perempuan tidak lagi identik dengan kelemahan emosional atau keterbatasan administratif, melainkan mulai dipahami sebagai bentuk kapasitas politik yang setara dengan laki-laki. Perubahan tersebut berkaitan dengan meningkatnya penerimaan publik terhadap perempuan dalam jabatan strategis pemerintahan daerah setelah munculnya praktik kepemimpinan perempuan yang relatif stabil dan adaptif dalam birokrasi lokal (Kompas, 2021). Perspektif ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial mengenai kepemimpinan perempuan mengalami pergeseran dari citra subordinatif menuju pengakuan terhadap kompetensi politik perempuan dalam ruang publik.

Perubahan konstruksi sosial tersebut juga terlihat dari meningkatnya representasi simbolik perempuan dalam diskursus politik lokal. Informan dari kalangan akademisi dan aparatur pemerintahan menyatakan bahwa keberadaan kepala daerah perempuan mulai mempengaruhi cara masyarakat memandang relasi gender dalam struktur kekuasaan. Perempuan tidak lagi diposisikan semata sebagai pelengkap politik laki-laki, tetapi mulai dipahami sebagai aktor politik yang mampu memproduksi kebijakan dan memimpin institusi pemerintahan secara mandiri (Tong & Botts, 2018). Dalam perspektif feminisme eksistensial, perubahan tersebut menunjukkan proses pelepasan perempuan dari posisi "liyan" menuju subjek politik yang memperoleh pengakuan sosial dalam ruang kekuasaan publik.

Tabel 3. Transformasi Persepsi Gender dalam Politik Lokal Kabupaten Serang

Bentuk stereotip lama	Perubahan persepsi	Faktor pendorong	Temuan lapangan
Perempuan dianggap kurang tegas dalam memimpin	Perempuan dinilai mampu mengelola pemerintahan daerah	Praktik kepemimpinan administratif yang stabil	Informan birokrasi menyatakan adanya peningkatan kepercayaan publik
Politik dipandang sebagai arena laki-laki	Politik mulai dipahami sebagai ruang partisipasi setara	Representasi kepala daerah perempuan	Masyarakat mulai menerima perempuan sebagai pemimpin publik
Perempuan dianggap emosional dalam pengambilan keputusan	Perempuan dipersepsikan memiliki sensitivitas sosial tinggi	Pendekatan pelayanan publik dan sosial	Kebijakan sosial dianggap lebih responsif

Jabatan publik perempuan dianggap simbolis	Perempuan dipandang memiliki kapasitas strategis	Eksposur media dan legitimasi elektoral	Media lokal menampilkan citra kepemimpinan aktif

Sumber: Diolah dari hasil wawancara penelitian, Kompas (2021), Badan Pusat Statistik (2023), dan UN Women (2020).

Transformasi persepsi gender tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki dampak sosial yang melampaui aspek administratif pemerintahan. Kehadiran perempuan dalam posisi kepala daerah mempengaruhi cara masyarakat memahami relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Beberapa informan menyebutkan bahwa perempuan muda di Kabupaten Serang mulai menunjukkan ketertarikan lebih besar terhadap organisasi sosial dan aktivitas politik setelah melihat representasi perempuan dalam kepemimpinan daerah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa representasi politik perempuan dapat berfungsi sebagai model sosial yang memperluas imajinasi perempuan mengenai akses terhadap kekuasaan publik (UN Women, 2020).

Dalam konteks feminisme eksistensial, perubahan tersebut berkaitan dengan proses pembentukan identitas perempuan sebagai agen sosial yang aktif. Simone de Beauvoir menekankan bahwa perempuan memperoleh eksistensinya ketika mampu menentukan dirinya secara bebas dalam ruang sosial yang sebelumnya membatasi keberadaannya (Tong & Botts, 2018). Kepemimpinan perempuan dalam politik lokal memperlihatkan bahwa perempuan tidak lagi hanya direpresentasikan melalui identitas domestik, tetapi juga melalui kapasitas intelektual, administratif, dan politik dalam pemerintahan daerah. Analisis ini sejalan dengan penelitian Sinaga (2025) dan Ramadhani (2025) yang menunjukkan bahwa perempuan memperoleh pengakuan sosial ketika berhasil membangun identitas independen di ruang publik.

Perubahan relasi gender politik juga terlihat dalam dinamika birokrasi pemerintahan daerah. Informan aparatur pemerintah daerah menjelaskan bahwa pola komunikasi birokrasi pada masa kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah menunjukkan pendekatan yang lebih partisipatif dibandingkan pola kepemimpinan yang sebelumnya lebih hierarkis. Situasi tersebut mempengaruhi relasi kerja antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan birokrasi, terutama dalam distribusi peran dan keterlibatan perempuan dalam proses administrasi pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat mempengaruhi kultur organisasi pemerintahan melalui pendekatan sosial yang lebih inklusif terhadap relasi gender dalam institusi publik (Badan Pusat Statistik, 2023).

Representasi perempuan sebagai agen transformasi sosial juga diperkuat melalui produksi citra politik dalam media dan ruang publik. Pemberitaan media lokal maupun nasional cenderung menampilkan kepemimpinan perempuan sebagai simbol perubahan sosial yang berkaitan dengan modernisasi politik daerah dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan (Kompas, 2021). Dalam perspektif citra politik, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kapasitas perempuan sebagai pemimpin publik (Aulia, 2023). Produksi citra tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak lagi semata diasosiasikan dengan peran domestik, melainkan juga dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan politik dalam struktur pemerintahan daerah.

Analisis terhadap representasi sosial tersebut menunjukkan adanya dekonstruksi stereotip gender dalam ruang politik lokal. Stereotip yang sebelumnya menganggap perempuan tidak kompeten memimpin mulai mengalami pelemahan akibat munculnya pengalaman empiris masyarakat terhadap praktik kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat lebih menilai efektivitas kepemimpinan berdasarkan hasil kerja administratif dan pelayanan publik dibandingkan identitas gender pemimpin. Perubahan ini sejalan dengan kajian Fairuz (2025), Navia (2025), dan Arrosyid et al. (2025) yang menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam ruang publik mampu mengubah konstruksi budaya patriarkal yang sebelumnya menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Kepemimpinan perempuan dalam politik lokal juga memperlihatkan hubungan antara representasi gender dan demokrasi inklusif. Kehadiran perempuan dalam jabatan publik memperluas partisipasi sosial kelompok perempuan dalam proses politik serta memperkuat legitimasi demokrasi yang lebih representatif. Inter-Parliamentary Union (2023) menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik berkontribusi terhadap perluasan akses kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks Kabupaten Serang, kepemimpinan perempuan

memperlihatkan bahwa demokrasi lokal tidak lagi sepenuhnya dimonopoli oleh elite politik laki-laki, melainkan mulai membuka ruang representasi gender yang lebih beragam.

Dalam kerangka feminisme eksistensial, perubahan tersebut menunjukkan bahwa perempuan mampu mengubah struktur makna sosial mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Beauvoir memandang bahwa perempuan harus keluar dari konstruksi sosial yang menjadikannya objek dalam relasi sosial patriarkal agar dapat memperoleh kebebasan eksistensial sebagai subjek (Tong & Botts, 2018). Kepemimpinan perempuan di tingkat daerah memperlihatkan bahwa perempuan dapat membentuk identitas politik yang independen melalui keterlibatan aktif dalam ruang publik dan pengambilan keputusan politik. Analisis ini diperkuat oleh kajian Rusydah et al. (2025), Akhirah et al. (2023), dan Ridwan et al. (2026) yang menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam ruang sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan kesadaran gender masyarakat.

Implikasi kepemimpinan perempuan terhadap masa depan politik daerah menunjukkan adanya peluang transformasi politik yang lebih inklusif di tingkat lokal. Informan penelitian menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap perempuan dalam jabatan publik dapat membuka peluang lebih besar bagi keterlibatan perempuan lain dalam kontestasi politik daerah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki efek sosial jangka panjang terhadap perubahan budaya politik lokal dan perluasan partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan individual, tetapi juga berkaitan dengan perubahan relasi gender dan transformasi sosial dalam demokrasi lokal kontemporer (Suryakusuma, 2011; Resmi et al., 2024; Ridwan & Inhilda, 2025).

KESIMPULAN

Kepemimpinan politik Ratu Tatu Chasanah merepresentasikan transformasi eksistensi perempuan dalam ruang politik lokal melalui kemampuan membangun legitimasi sosial, menjalankan otoritas pemerintahan, serta memproduksi citra kepemimpinan yang mampu menantang konstruksi patriarki dalam masyarakat. Perspektif feminisme eksistensial Simone de Beauvoir menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam struktur kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap jabatan politik, tetapi juga berkaitan dengan proses penegasan perempuan sebagai subjek yang memiliki kebebasan, kapasitas intelektual, dan otonomi dalam menentukan arah sosial politik. Praktik kepemimpinan yang dijalankan Ratu Tatu Chasanah memperlihatkan adanya perubahan relasi gender dalam politik lokal melalui meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin publik, berkembangnya representasi perempuan dalam ruang birokrasi dan pemerintahan, serta melemahnya stereotip mengenai inferioritas perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kepemimpinan perempuan dalam konteks tersebut juga memiliki dimensi simbolik sebagai representasi demokrasi yang lebih inklusif karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam kehidupan politik daerah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa citra kepemimpinan perempuan tidak lagi dibentuk semata melalui identitas gender, melainkan melalui kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun relasi sosial politik, dan keberhasilan menghadirkan praktik pemerintahan yang memperoleh legitimasi publik dalam dinamika politik lokal kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Akhirah, S. R., Setiadi, D., & Firdaus, A. (2023). Representasi Perempuan yang Tercermin dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila Salikha Chudori. *Jurnal Ilmiah FONEMA*, *6*(2), 101-117. https://doi.org/10.25139/fn.v6i2.6518

Amikra, A. (2025). Budaya Patriarki dalam Novel Separate Beds Kajian Feminisme Betty Friedan. *Cakrawala Indonesia*, *10*(2), 340-346. https://doi.org/10.55678/jci.v10i2.2316

Aprilia, L., & Aji, W. T. (2024). Perempuan Bumi: Diferensiasi Ketubuhan pada Laki-Laki dan Perempuan dalam Wahana Feminisme. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, *2*(2), 82-101. https://doi.org/10.54066/jikma.v2i2.1610

Arrosyid, M. A. K., Hasanudin, C., & Sutrimah, S. (2025). Representasi Feminisme Pada Film Women Form Rote Island. *SUSASTRA: Jurnal Ilmu Susastra dan Budaya*, *14*(1), 39-53. https://doi.org/10.51817/susastra.v14i1.230

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Democratic decline in Indonesia: The rise of populism and the weakening of democratic institutions*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.

Aulia, M. F. (2023). Tinjauan Teoretis Mengenai Citra Sebagai Komoditas Identitas: Studi Kasus Fenomena Gerakan Hijrah Kontemporer. *DESKOVI: Art and Design Journal*, *6*(2), 173-186. https://doi.org/10.51804/deskovi.v6i2.14278

Auliya, T. K., Raden, E. P. T., & Anjani, A. Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya. https://doi.org/10.15642/suluk.2025.7.2.116-136

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik gender Indonesia 2023*.

BBC News Indonesia. (2020, 10 Desember). *Dinasti politik di Pilkada dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia*. bbc.com

Detik News. (2022, 15 Maret). *Profil Ratu Tatu Chasanah dan kepemimpinannya di Kabupaten Serang*. Detik.com.

Fairuz, F. (2025). Dekolonisasi Citra Nyai: Representasi Perempuan Dalam Sistem Kolonial Dan Feodal Hindia Belanda Pada Tokoh Nyai Ontosoroh. *Pujangga*, *11*(2), 144-152. https://doi.org/10.47313/pujangga.v11i2.4334

Ferdinand, M., Endang, A., & Heriazwi, M. (2025). Feminsime Eksistensialis Pada Novel" Re Dan Perempuan Karya Maman Suherman. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, *4*(4), 783-792. https://doi.org/10.37676/mude.v4i4.9000

Hayati, S. M. (2024). Interpretasi QS. Al-Nisā'[4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, *10*(2), 167-185. https://doi.org/10.32495/nun.v10i2.842

Inter-Parliamentary Union. (2023). *Women in national parliaments: Global statistics*.

Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Rekapitulasi hasil Pemilu anggota DPR RI tahun 2019*.

Kompas. (2021, 5 Juni). *Kepemimpinan perempuan dalam politik lokal Indonesia semakin meningkat*. Kompas.com.

Kurniawan, S. A., Chasanah, I. N., & Setijowati, A. (2023). Potret Perempuan Dalam Novel Men Coblong Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme. *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, *23*(2), 138-151. https://doi.org/10.30996/parafrase.v23i2.9758

Laritmas, G. P. (2025). Rekonstruksi Eksistensi Perempuan melalui Kritik Sastra Feminis terhadap Kidung Agung 3: 1-5. *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen*, *3*(2), 37-58. https://doi.org/10.61404/juitak.v3i2.400

Navia, N. (2025). Representasi Feminisme pada Film Damsel. *Literature Research Journal*, *3*(1), 23-32. https://doi.org/10.51817/lrj.v3i1.1194

Ni'mah, A. F., Aldi, M., & Maftuchah, F. (2025). Rekonstruksi Teologi Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fatimah Mernissi dan Mansour Fakih. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, *6*(1), 2639-2654. https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8911

Pemerintah Kabupaten Serang. (2022). *Laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang*.

Pratiwi, R. I., & Putriani, R. (2024). Eksistensi Perempuan Dalam Novel Kinasih Karya Nisaul Kamilah Chisnulloh: Kajian Feminisme Eksistensialis. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, *2*(4), 223-238. https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i4.56

Ramadhani, N. I. (2025). Eksistensi Perempuan Oman Dalam Novel Sayyidat Al-Qamar Karya Jokha Al-Harsty Kajian Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, *14*(1), 56-68. https://doi.org/10.36668/jal.v14i1.1254

Ratu, V. R., Nai, F. A., & Doko, Y. D. (2025). Citra Perempuan Dalam Novel Tirai Menurun Karya Nurhayati Sri Hardini: Kajian Feminisme Ekstensialisme. *Bianglala Linguistika: Jurnal Linguistik*, *13*(1), 1-7. https://doi.org/10.35508/bianglala.v13i1.22644

Ratu, V. R., Nai, F. A., & Jama, K. B. (2025). Citra Perempuan dalam Novel Tirai Menurun Karya Nurhayati Sri Hardini: Kajian Feminisme Eksistensialisme. *Jurnal Lazuardi*, *8*(1), 113-139. https://doi.org/10.53441/jl.Vol8.Iss1.160

Resmi, N. C., Yunus, M., & Anwari, M. R. (2024). Feminisme dalam Film Mimpi Ananda Raih Semesta Karya Aishworo Ang (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 244-260. https://doi.org/10.23917/jkk.v3i3.324

Ridwan, R., & Inhilda, I. (2025). Romantisasi atau Pembebasan? Kritik Feminisme Terhadap Representasi Perempuan dalam'Hanya Dalam Puisi'Karta Ajip Rosidi. *Prosodi*, *19*(2), 263-278. https://doi.org/10.21107/prosodi.v19i2.31571

Ridwan, R., & Vanesa, V. (2025). Otoriter Budaya Patriarki dalam Novel Azab dan Sengsara Karya Merari Siregar: Feminisme Eksistensialitas. *Prosodi*, *19*(1), 1-16. https://doi.org/10.21107/prosodi.v19i1.25465

Ridwan, R., Nensilianti, N., & Turohma, L. (2026). Mengungkap Perlawanan Perempuan dan Subordinasi dalam Film Perempuan Berkelamin Darah Tahun 2023 melalui Lensa Feminis Radikal Kate Millet. *Jurnal Dieksis ID*, *6*(1), 371-383. https://doi.org/10.54065/dieksis.6.1.2026.1320

Rusydah, N., Heryani, Y., & Solihin, I. (2025). Citra Tokoh Wanita Dalam Film Takki Karya Mohammad Makki (Kajian Feminisme Julia Kristeva). *Jurnal Ilmiah FONEMA*, *8*(Spesial), 359-374. https://doi.org/10.25139/fn.v8i1%20Spesial.10208

Sinaga, C. (2025). Citra Perempuan dan Pencarian Jati Diri dalam Cerpen-Cerpen Nh. Dini: Kajian Feminisme Eksistensial dalam Sastra Indonesia Modern. *Sinonim: Journal of Language and Literature*, *3*(02), 36-43. https://doi.org/10.54209/sinonim.v3i02.451

Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan orde baru*. Komunitas Bambu.

Tong, R., & Botts, T. (2018). *Feminist thought: A more comprehensive introduction* (5th ed.). Routledge.

UN Women. (2020). *Women's leadership and political participation*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.